

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	0
---	---	---	---

SUBBAGIAN HUMAS



Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Cetak	Radar Semarang
Media Online	

Wilayah: BPK Jateng

Halaman 8

Ratusan Paket Tak Sesuai Volume

**TEMUAN BPK
ATAS BELANJA
MODAL
INFRASTRUKTUR
TA 2019**

- Kekurangan volume pekerjaan pada **171** paket pekerjaan senilai **Rp 8,986 miliar**.
- Tidak sesuai spesifikasi teknis pada **43** paket senilai **Rp 5,645 miliar** di sembilan pemda.
- Pekerjaan tidak selesai tepat waktu dan belum dikenakan denda keterlambatan minimal **Rp 666 juta** dan kekurangan penerimaan atas jaminan sebesar **Rp 520** juta pada lima pemda.

- BPK merekomendasikan kepala daerah untuk memerintahkan pengguna anggaran (kepala OPD) memproses dan mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran atas pekerjaan tak sesuai volume.
- Memerintahkan pengguna anggaran mencairkan jaminan pelaksanaan sebesar **Rp 520 juta** untuk disetorkan ke kas daerah.

(sumber BPK Perwakilan Jateng)

SEMARANG, Radar Semarang-Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Tengah masih menemukan sejumlah permasalahan atas belanja modal bidang infrastruktur Tahun Anggaran (TA) 2019 pada sejumlah pemerintah daerah (pemda). Mulai kekurangan volume paket pekerjaan hingga kelebihan pembayaran.

Hal tersebut mencuat saat penerimaan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas belanja modal bidang infrastruktur TA 2019 dari BPK Perwakilan Jateng kepada sebelas pemda.

Kesebelas Pemda tersebut adalah Kota Semarang, Kabupaten Rembang, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Batang, dan Kabupaten Kendal. LHP

tersebut diserahkan Kepala Perwakilan (Kalan) BPK Provinsi Jateng Ayub Amali kepada sejumlah kepala daerah dan pimpinan DPRD yang hadir.

Kalan BPK Provinsi Jateng Ayub Amali mengatakan, masih menemukan adanya beberapa permasalahan. Diantaranya seperti terdapat kekurangan volume pekerjaan pada 171 paket pekerjaan senilai mencapai Rp 8,986 miliar. Di mana tidak sesuai spesifikasi teknis pada 43 paket pekerjaan senilai Rp 5,645 miliar di sembilan Pemda.

Selain itu, pekerjaan tidak selesai tepat waktu yang belum dikenakan denda keterlambatan minimal sebesar Rp 666,53 juta dan kekurangan penerimaan atas jaminan pelaksanaan sebesar Rp 520,62 juta pada lima Pemda.

"Atas temuan-temuan tersebut, kami merekomendasikan kepada kepala daerah agar memerintahkan para Pengguna Anggaran (Kepala Organisasi Perangkat Daerah) untuk memproses dan mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran," kata Ayub Amali dalam rilisnya Rabu (8/1).

Termasuk potensi lebih bayar atas pekerjaan yang tidak sesuai volume dan tidak sesuai spesifikasi teknis. Dengan demikian, pihaknya, kembali merekomendasikan agar kepala daerah memerintahkan Pengguna Anggaran memproses dan mempertanggungjawabkan kekurangan penerimaan daerah atas pekerjaan yang tidak selesai dikerjakan tepat waktu.

"Kemudian mencairkan jaminan pelaksanaan sebesar Rp 520,62 juta untuk disetorkan ke kas daerah. Sedangkan pemeriksaan atas belanja modal bidang infrastruktur ini, merupakan pemeriksaan yang kami lakukan pada semester II tahun 2019," jelasnya.

Terpisah, Sekretaris Komunitas Pemerhati Korupsi (Kompak) Jawa Tengah, Sasetya Bayu Efendi meminta sejumlah rekomendasi BPK tersebut untuk segera dilaksanakan. Menurutnya, ada potensi korupsi apabila terus diabaikan. Pihaknya juga berjanji akan memantau sejumlah rekomendasi BPK tersebut.

"Kami akan turunkan tim di 11 Pemda tersebut, tujuannya agar proyek pemerintah tidak disalahgunakan dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat," tandasnya. (jks/zal)